

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, O. (2013). . Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. . . *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah*.
- Algifari. (2014). *Hubungan Antara Pendapatan Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Amalia, R. firda, & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*.
- BPS. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Ketujuh. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pogram SPSS*. <https://doi.org/10.1126/science.1158668>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harliyani, E. M., & Haryadi. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Povinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3.
- Iskandar, A., & Subekan, A. (2018). Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012) (Local Financial Performance and The Social Welfare on Districts and Municipals of South Sulawesi on 2. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2834678>
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dua)*. UPP

STIM YKPN.

Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Nedo, A., & Jember, I. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005).

Prakoso, L. I. (2017). Pengaruh kinerja keuangan terhadap indeks pembangunan manusia dengan alokasi belanja modal sebagai variable moderasi di kabupaten/kota se-provinsi lampung. In *Akuntansi*. Universitas Lampung.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggarann Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” (1998).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan). In *Diterjemahkan oleh Drs Haris Munandar, MA dan Puji AL, SE dari Buku Economic Development Ninth Edition*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (1999).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, (1999).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (2004).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, (2004).

UNDP. (1995). Human Development Report 1995: Gender and Human Development. In *Human Development Report (1990 to present)*.